

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Albrow, Martin. 2004. *Birokrasi*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Anslem Strauss dan Juliet Corbin. 2003, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, terjemahan Muhammad Shodiq, Pustaka Pelajar.
- Asshiddiqie, Jimly. 2012, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Azhari. 2011, *Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2002, *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*, Tim Pengkajian SPKN RI, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2015, *Dualisme Penelitian Hukum "Normatif & Empiris"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2012, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, UMY, Yogyakarta.
- Hackbart, Merl and James R. Ramsey. 2002, *The Theory of the Public Sector Budget: An Economic Perspective*, dalam Aman Khan dan W. Bartley Hildreth (Ed). *Budget Theory In The Public Sector*, Quorum Books , Westport.
- Hadari Nawawi. 2005, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press.

Marzuki. 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Munandar, M. 2001, *Budgeting, Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*, Edisi 1. Cetakan 14. BPFE: Yogyakarta.

Susanto. Mei, 2013, *Hak Budget Parlemen Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji. 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Ringkas*, Rajawali. Pers, Jakarta.

Soerjono Soekanto, *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Welsch, Hilton, Gordon. 2000. *Anggaran Perencanaan dan Pengendalian Laba*. Diterjemahkan oleh Purwatiningsih dan Maudy Warouw. Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta.

Peraturan Perundang - undangan

Undang – Undang Dasar NRI 1945.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*.

Peraturan Daerah tentang APBD Kota Surabaya.

Peraturan Walikota Surabaya tentang Penjabaran APBD Kota Surabaya.

Media Elektronik

<https://ebudgeting.surabaya.go.id>

<https://www.academia.edu/27216112/E->

[Budgeting untuk Melawan Korupsi APBD](#)

<https://uangteman.com/blog/indonesia/transparansi-anggaran-melalui-e-Budgeting/>

<http://news.liputan6.com/read/2652948/menyongsong-era-e-budgeting-2017-ini-pesan-menteri-asman-abnur>

<http://id.beritasatu.com/home/standardisasi-e-budgeting/110644>